

REGISTER RISIKO KECURANGAN

Nama Pemda : Pemerintah Kota Solok
 Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan Daerah
 Tahun Penilaian : 2026

No	Tahapan Proses	Uraian Risiko	Skenario Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Pengendalian Terpasang	Uraian Dampak	Rencana Mitigasi	
								Uraian	Waktu
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13
1	Perencanaan	Manipulasi data pendukung penganggaran	OPD meminta daftar harga barang/jasa ke pihak ke 3 atau penyedia dengan harga diatas harga pasar dan menyampaikan usulan harga barang dan jasa tsb untuk pengajuan SSH	Kepala BKD	Tim penyusun SSH tidak melaksanakan survey atau tidak mengkonfirmasi ulang ke pihak ke 3 atau penyedia atas usulan harga /jasa oleh OPD	Usulan SSH harus ada dalam renja OPD	Kerugian keuangan daerah	Tim penyusun SSH menyeleksi usulan SSH apakah usulan yang diajukan OPD telah ada dalam renja dan melakukan survey harga barang dan jasa yang diusulkan oleh OPD ke pihak ke 3 atau penyedia sebelum menyetujui harga barang/jasa yang diusulkan pada SSH	Januari - Desember 2026
2	Perencanaan	Pejabat berwenang mengesampingkan pengendalian dengan tidak melakukan verifikasi/evaluasi/review/validasi pada tahap perencanaan	Kegiatan yang pelaksanaan nya pada tahun sebelumnya tidak mencapai target keuangan dan fisik diatas 50 %, tetap dipertahankan pada rencana kerja tahun berikut oleh PPTK	Kepala BKD	Tidak dilakukannya evaluasi internal pada rencana kerja pada tahun sebelumnya	Rapat capaian program dan kegiatan tahun berjalan per triwulan	Pemborosan keuangan daerah	Membentuk tim evaluasi internal OPD dan mengevaluasi pelaksanaan	Januari - Desember 2026
3	Perencanaan	Mal administrasi berupa penyalahgunaan wewenang dalam pendataan	Calon Nasabah memberikan suap kepada petugas survey untuk persetujuan Pemberian Pinjaman Dana Pembiayaan Daerah	Kepala BKD	Tidak dilakukannya Survey Lapangan atas proposal yang masuk	Survey lapangan dilakukan oleh Tim, tidak perorangan	Kerugian keuangan daerah	Membentuk Tim Survey Proposal Peminjaman Dana Pembiayaan Daerah	Januari - Desember 2026
4	Pelaksanaan	Staff/pejabat menerima suap atau gratifikasi	Peminjam memberikan suap untuk persetujuan perpanjangan waktu peminjaman alat berat kepada petugas di lapangan	Kepala BKD	Pelayanan administrasi peminjaman alat berat masih dilakukan secara manual dan tidak dilakukan kontrol ke lapangan	1. SOP Peminjaman alat berat 2. Kartu Kendali Peminjaman alat berat	Kerugian keuangan daerah	Pelayanan administrasi peminjaman alat berat akan didukung sistem komputerisasi dan melakukan monitoring ke lapangan	Januari - Desember 2026
5	Pelaksanaan	Staff/pejabat tidak menyetorkan Cicilan Dana Pembiayaan Daerah yang disetorkan oleh masyarakat	Bendahara penerima/petugas penagihan tidak menyetorkan Cicilan Dana Pembiayaan Daerah ke Kas BLUD	Kepala BKD	Nasabah Melakukan pembayaran cicilan secara tunai	atasan mengingatkan Bendahara / petugas penagih untuk melakukan penyetoran setiap hari	Kerugian keuangan daerah	Membuat SOP Penagihan dan pengawasan secara berkala oleh pimpinan dan memeriksa laporan pengelolaan cicilan pembiayaan	Januari - Desember 2026
6	Pelaksanaan	Mark up biaya pelaksanaan kegiatan	PPTK membuat SPJ belanja melebihi nilai sebenarnya	Kepala BKD	Ada biaya yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan yang tidak teranggarkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administratif	Belanja sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Kerugian keuangan daerah	Mengajukan usulan pergeseran anggaran pada pelaksanaan kegiatan	Januari - Desember 2026

No	Tahapan Proses	Uraian Risiko	Skenario Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Pengendalian Terpasang	Uraian Dampak	Rencana Mitigasi	
								Uraian	Waktu
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13
7	Pelaksanaan	Pengeluaran dana fiktif	PPTK mengajukan pencairan dana atas pengeluaran yang sebenarnya tidak ada dengan menyiapkan SPJ fiktif namun penganggarannya ada di DPA	Kepala BKD	1. Agar realisasi kinerja kegiatan menjadi lebih besar 2. untuk menanggulangi biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan yang anggarannya tidak tersedia di DPA kegiatan tsb	Atasan mengingatkan agar melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien	Kerugian keuangan daerah	1. Perbaiki sistem dan pengawasan pengendalian internal 2. peningkatan kultur organisasi seperti meningkatkan keteladanan pimpinan, menciptakan lingkungan kerja yang positive 3 Meningkatkan komitmen anti kecurangan 4. Menerapkan sistem reward and punishment 5. mengadakan sosialisasi anti kecurangan bagi pegawai	Januari - Desember 2025
8	Pelaksanaan	Staf atau pejabat menerima gratifikasi atau suap dalam pembelian barang	PPTK menerima fee berupa uang atau barang atas pembelian barang dari penyedia setelah transaksi atau saat penyelesaian administrasi pembelian barang	Kepala BKD	adanya transaksi atau deal antara pptk dan penyedia sebelum terjadinya transaksi	penggunaan e katalog dalam pembelian barang	Memicu konflik kepentingan yang mempengaruhi kerja dan keputusan serta reputasi pemerintah kota, hilangnya kepercayaan masyarakat, dan menurunnya kinerja pegawai pemerintahan	Meningkatkan kesadaran pegawai akan dampak dari gratifikasi dengan memberikan sosialisasi tentang gratifikasi dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi e katalog dalam pembelian barang	Januari - Desember 2025
9	Pertanggungjawaban /pelaporan	Memalsukan bukti yang digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban	Staff atau pejabat mencetak faktur dan stempel menyerupai milik pihak penyedia untuk digunakan untuk surat pertanggungjawabban	Kepala BKD	1. adanya motivasi atau peluang untuk keuntungan pribadi staff atau pejabat 2. adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan 3. adanya pembenaran (diterima secara umum terhadap tindakan tersebut)	Bukti yang dipertanggungjawabkan harus asli dan di stempel basah	Kerugian keuangan daerah	PPK-SKPD sebagai verifikator SPJ untuk lebih hati-hati dan teliti dalam memeriksa kebenaran SPJ yang diajukan oleh pelaksana kegiatan	Januari - Desember 2025
10	Pengadaan barang dan jasa	Perencanaan pengadaan tidak disusun sesuai kebutuhan untuk mengakomodir kepentingan pribadi/pihak tertentu	Melakukan pembelian barang dengan jenis yang sama atas barang yang telah ada, dimana kondisi barang yang telah ada tersebut diperkirakan kerusakannya ringan dan masih dapat diperbaiki	Kepala BKD	adanya peluang untuk menganggarkan pengadaan barang baru	usulan RKBMD	Pemborosan keuangan daerah	Tim RKBMD melakukan cek fisik kondisi barang dan jumlah barang yang dibutuhkan OPD setelah adanya usulan RKBMD OPD	Januari - Desember 2025

Solok, Januari 2026

KEPALA BKD KOTA SOLOK

NOVIRNA HENDAYANI SE, M.Si Akt
NIP. 19661116 199003 2 001